**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM KETENTUAN WORLD TRADE ORGANIZATION**

**(Studi Kasus Perdagangan Impor Beras Dari Vietnam Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)**

**Argo Dewantara,Setyasih Harini, S.IP., M.Si., Drs. GPH. Dipokusumo, M.Si.**

**ABSTRACT**

This thesis is aimed to discuss the economic diplomacy constituting the economic instrument in achieving the national interest. To maintain the national food tenacity in which at that time there was a lack of national rice stock during Susilo Bambang Yudhoyono reign, Indonesia imported rice from Vietnam to meet the need for food stock, recalling Vietnam’s good agricultural condition. The agreement o f rice importing between these two countries is governed by the agreement in WTO agricultural sector through Agreement of Agricultural (AOA) existing in the rules of market access, domestic subsidy, and import subsidy with those regulations thereby generating the provision of rule specified in the agreement and creating a fair non-discriminative trade between WTO members. It is the requirement with which the members of WTO should comply. Using Economic Diplomacy and International Organization theories, the method used in this research was qualitative one with secondary data, technique of collecting secondary data and document-based research, and library research through descriptive elaboration. Through Indonesian Economic Diplomacy, according to WTO’s provision, the author found Indonesian Economic Diplomacy needed support and good coordination and shared objective of government, private, stakeholders, and the optimization of economic diplomacy on (central and local) government’s capacity and domestic ability and could make Indonesian economic diplomacy in WTO organization change any time; therefore Indonesian economic diplomacy could run well in WTO issues and made Indonesian economic diplomacy the symbol of state’s power in international view.

Keywords: Economic Diplomacy, World Trade Organization (WTO), Agreement of Agriculture (AOA).

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bergerak di bidang Pertanian.Lua swilayah yang luas, serta Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kenanekaragaman hayati yang melimpah serta berilkim tropis sehingga bisa menanam sepanjang tahun.Berdasarkan data sumber yang diperoleh dari BPS (BadanPusatStatistik) tahun 2009, petani mencapai 44% dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7juta jiwa. Jumlah total lahan pertanian mencapai 1,725,034 ha dalam kurun waktu 5 tahun luas lahan wilayah pertanian bertambah pada tahun 2013 sebesar 1,845,447 ha. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk semakin bertambah.Dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk kebutuhan pangan khususnya beras mengalami peningkatan , serta terjadinya permasalahan di Indonesia mengalami kekurangan stok beras. Permasalahan yang terjadi terdiridari 2 yaitu permasalahan berkala yaitu terjadinya bencana alam,konflik sosial , permasalahan kronis adalah proses berulang-ulang seperti kekurangan ketersediaan pangan.

Maka Indonesia membuka keran impor beras dari Vietnam pada 5 April sampai 31 Desember 2006 dengan nota perjanjian MOU on Rice dinamakan kerjasama *Joint Commision Indonesia-Vietnam on Economic and Technical Cooperation (JCESTC)*. Berisi perjanjian impor beras sebesar satu juta ton per tahun dan dimana tidak tiap tahun Vietnam impor beras akan tetapi jika kebutuhan stok beras Indonesia mengalami kekurangan maka impor beras dilakukan .Perjanjian ini diperpanjang untuk jangka waktu 2010-2012.Tergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam World Trade Organization (WTO), pada tahun 1994 yang mengusung perdagangan bebas melalui perjanjian multilateral.dimana menjadikan perdagangan yang aturan main dalam impor beras akan diatur oleh WTO melalui persetujuan bidang pertanian Agreement Of Agriculture (AOA) dengan tujuan mengurangi distrosi peradagangan dan memperluas liberalisasi perdagangan di bidang pertanian yang mengandung tiga unsur dalam perjanjian AOA tersebut adalah:

1. AksesPasar
2. SubsidiDomestik
3. SubsidiImpor

Jadi semua perjanjian pertanian khususnya beras harus menaati aturan main dalam bidang pertanian dalam melaksanan kepentingan nasional masing-masing negara. Dan dibentuknya WTO peran Diplomasi Ekonomi menjadi sangat krusial bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,dalam masalah kerjasama khususnya Indonesia dengan Vietnam yang sesame anggota WTO maka Diplomasi Ekonomi Sangat penting dan perlu digunakan guna mekasimalkan perolehan atas hal-hal yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masing-masing bangsa.

 Berdasarkan uraian latara belakang diatas peneliti mencoba memahami tentang bagaimana diplomasi ekonomi indonesia dalam kententuan WTO. maka peneliti merumuskan bagaimana diplomasi ekonomi indonesia dalam ketentuan WTO Studi kasus impor beras dari Vietnam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono?

Diplomasi Ekonomi Indonesia adalah salah satu instrument penting dalam kegiatan ekonomi menurut buku (Rana:Economic Diplomacy) menjelaskan diplomasi ekonomi adalah Diplomasi Ekonomi sebagai suatu proses, melalui proses mana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain. Guna memaksimalkan dan perolehan kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi , baik secara bilateral maupun multilateral. Maka Diplomasi Ekonomi dapat diartikan sebagai proses seni yang dinamik dalam proses pelaksanaan salalu berbeda-beda sesuai dengan pihak – pihak yang terlibat dalam proses tersebut, untuk memkasimalkan pencapaian suatu tujuan atau kepentingan dalam membangun dan megembangkan kegiatan ekonomi. Sejak pendirian Wolrd Trade Organization (WTO) tahun 1995 , peran Diplomasi Ekonomi menjadi semakin krusial bagi negara – negara berkembang untuk meningkatkan dan terus mengembangkan pembangunan ekonomi. peran dan fungsi diplomasi ekonomi(Barany,Pavol, Modern Economic Diplomacy) peran dan fungsi diplomasi ekonomi ada berbagai faktor yang diantaranya , ekpansi pesat yang terjadi pada ekonomi pasar , liberalisasi perekonomian nasional dan peningkatan interaksi negara melalui perdagangan. Serta peningkatan aktor ekonomi global seperti perusahaan multinasional, bank,dan kelompok investasi, perkembangan inovasi ekonomi negara terhadap keterbukaan ekonomi eksternal. Hal ini berdampak pada pembangunan citra positif negara yang akan menarik daya tarik investasi asing,sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Untuk menciptakan kesempatan tersebut, diplomasi ekonomi dilakukan dengan mengadakan pertemuan antara eksportir dan importir di partner dagangnya, untuk menjelaskan dan menyusun prioritas serta memperlihatkan aspek-aspek mana yang menguntungkan apabila kegiatan ekspor-impor dilakukan. Selanjutnya, fungsi lain adalah untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas perdagangan internasional, melobi kepentingan perusahaan domestik di luar negeri, bantuan politik dan perdagangan, mobilisasi sumber daya eksternal yang efektif untuk tujuan pembangunan, serta yang paling utama adalah untuk mempertahankan kondisi yang menguntungkan dari kerjasama ekonomi internasional yang mampu mendorong dan meningkatkan level dan kualitas kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. dalam buku berjudul metode penelitian hubungan internasional yang ditulis oleh Umar Suryadi Bakrie(2016:14). yang mendifinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penedekatan untuk mengeksplorarisasi dan memahami makna(meaning) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan.objek utama dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep tinjauan pustaka.dan sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder yang menggunakan studi pustaka serta teknik pengumpulan data libary research atau mencari data dan mengumpulkan data lewat dokumen,literatur,buku,artikel,jurnal yang mendukung dan data merupakan data yang sesungguhnya. serta teknik analisis data menggunakan model interaktif dalam triangulasi data yaitu reduksi data,penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

General Agreement On Tariff And Trade (GATT) didirikan setelah Perang Dunia II (tahun 1947) bersamaan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),International Monetary Fund (IMF), International Bank For Recontruction and Development (IBRD/Bank Dunia). GAAT adalah satu-satunya organisasi multilateral yang membuat peraturan tentang kebijakan perdagangan internasional. GATT beranggotakan bangsa-bangsa (117 pada tahun 1993) yang berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip pengurangan hambatan perdagangan dan distorsi perdanganan lainya. (Ratya Anindita&Michae R.Reed,2008:dikutip dari buku bisnis dan perdagangan internasional,hal:67).

World Trade Organization (WTO) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Awalnya GATT ditunjukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Breeton Woods(IMF dan Bank Dunia). GATT masih tetap sama sebagiamana pada tahun 1948 dengan beberapa penambahan yaitu berbentuk persetujuan dan upaya-upaya pengurangan tariff.

Masalah penyelesaian perdagangan melalui perundingan multilateral yang dikenal dengan “Putaran Perdagangan”,sebagai upaya mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Putaran Perdagangan GATT berkonsentrasi pada negosiasi upaya pengurangan tariff.Putaran Kennedy pada tahun 1960-an membahas persetujuan Anti-Dumping. Putaran Tokyo tahun 1970-an upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan dan perbaikan sistem perdagangan. Putaran terakhir dan terbesar adalah putaran Uruguay berlangsung dari tahun 1986-1994 dan mengarah pada pembetukan WTO.

Setelah WTO terbentuk yang berawal dari negosiasi yang dikenal dengan “Uruguay Round” 1986-1994 serta perundingan sebelumnya dibawah GATT. WTO saat ini terdiri dari 184 negara dengan 24 diantaranya adalah Negara peninjau (.(Sekilas WTO edisi ketujuh 2013, Kementerian Luar Negeri Indonesia) . Saat ini WTO menjadi wadah negosisasi sejumlah perjanjian baru dibawah “Doha Development Agenda” yang dimulai pada tahun 2001.

GATT merupakan awal dari pembentukan WTO, maka sebagai acuan dasar utama perdagangan yang akan menghasilkan berbagai negosiasi dan persetujuan atau perjanjian perdagangan antar Negara angotta, dan saat ini. Tujuan dan fungsi WTO salah satunya adalah Mendorong arus perdagangan antar Negara , dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat menganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.

1. Prinsip-Prinsip Sistem Perdagangan Multilateral WTO
2. Most Favoured Nation (MFN
3. Perlakuan Nasional (National Treatment)
4. Transparasi (Transparency)
5. Persetujuan Bidang Pertanian

Pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan karena selama ini disadari sering terjadi distorsi perdagangan atas produk-produk pertanian karena pengenaan kouta impor dan pemberian subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Tujuan persetujuan bidang pertanian adalah untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar. Hal ini dapat memperkuat tingkat impor prediksi dan keamanan negara-negara pengimpor maupun pengekspor. Dengan berjalannya perkembangan WTO ,salah satunya pada saat putaran Uruguay 1986-1994 menjadi putaran yang paling penting dikarenakan lahirnya WTO menggantikan GATT yang secara resmi WTO Diberlakukan pada 1 Januari 1995 serta secara otomatis membawa sektor pertanian masuk kerabgka perdagangan WTO lewat perjanjian Agreement Of Agriculture (AOA) ,tujuan adanya AOA adalah mengurangi distorsi perdagangan dan memperluas liberalisasi perdaganan dibidang pertanian dan secara bertahap mengurangi distori perdagangan yang sesuai dengan aturan GATT. Aturan yang dimaksud dan proteksi tersebut harus diterapkan secara non-diskriminatif sesuai asas Most Favoured Nations.

Seperti diketahui, ekspor negara berkembang lebih banyak berupa bahan mentah produk pertanian. Hanya ada 2 (dua) perjanjian yang menguntungkan negara sedang berkembang yang berhasil masuk ke dalam WTO, yaitu pertanian dan tekstil. Aspek positif dari Agreement on Ariculture (AoA) adalah dengan masuknya pertanian dalam peraturan perdagangan multilateral, maka negara maju yang selama ini mensubsidi produksi dan ekspor pertanian harus tunduk pada peraturan menghapuskan segala distorsi perdagangan, diantaranya adalah dengan mengurangi subsidi tersebut.*(Akbar Kurnia Putra,2016,Journal.Vol 1hal 90-105.Agremment Of Agriculture,Universitas Jambi).*Pada dasarnya AOA mengandung tiga unsur utama yaitu:

1. Akes Pasar

Akses pasar dibidang pertanian adalah konsep yang paling mendasar dalam perdangangan internasional, dalam hal ini ditujukan guna menciptakan perdagangan tanpa hambatan. Sehingga setaip komoditi/barang memiliki kesempatan bersaing yang sama disemua negara anggota WTO.

Pada tahun 1995 , persetujuan bidang pertanian telah menetapkan pengurangan tariff sebesar rata-rata 36% bagi negara maju, dengan tingkat minimum tariff 15% dalam kurun waktu 6 tahun.bagi begara berkembang penetapan pengurangan tariff sebesar 24% dengan jumlah pengurangan minimum sebesar 10% yang harus dicapai dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan bagi negara kurang berkembang mendapat pengecualan untuk melaksanakan komitmen penurunan tariff. Pada persetujuan tariff bidang pertanian dikenakan tariff yang ditentukan sebelumnya dan tingkat tariff ini menunjukan penurunan rata-rata yang dijalankan pada tahun 2004,WTO memperhitungkan dimana mengalami penurunan sebesar 4% dari 4,2%.

Ketentuan yang berlakunya persetujuan akses pasar yang ada dalam AOA terbukti pada saat Indonesia mengalami kekuarangan stok beras dan harus mencukupi ketahanan panganya, pada saat itu telah melakukan impor beras dengan Vietnam sebanyak satu juta ton dengan harga 3500perkg.dengan melihat ketentuan diberlakukannya tariff mengenai akses pasar bagi negara berkembang sebanyak 24 persen dengan batas minimum 10 persen maka dapat diakatakn dengan kententuan seperti ini menjadikan pasar yang adil dengan harga yang lebih murah tanpa memperhitungkan tariff yang dikenakan, tetapi kedua negara anggota WTO sudah diberikan kententuan yang adil dengan tariff rendah sesuai batas jumlah kuota.

1. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah bantuan pemerintah suatu negara yang diberikan kepada eksportir atau produsen yang melaksanakan ekpsor produk tertentu. Dengan adanya bantuan tersebut para eksportir penerima subsidi akan lebih mampu bersaing dalam merebut pasar ekpspor, komitmen yang dimaksudkan guna mendisplinkan atau melaksanakan kebijakan dan tindakan pemerintah yang menyalurkan bantuan ekspor dalam bentuk subsidi ekspor. Penguraangan subsidi ekspor dilaksanakan pada tingkat volume komoditas ekspor mapupun dalam bentuk nilai (budgetary), tujuan pengurangan subsidi ekspor untuk mengurangi distorsi perdagangan intenasional, karena kebijakan subsidi ekspor dianggap dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar negara pemberi subsidi dan negara pengimpor.langkah ini digubakan untuk menciptakan,memperluas dan mempertahankan pasar ekspor terbesar di berbagai negara. Subsidi ekspor dalam pertanian sudah dibatasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuan persetujuan bidang pertanian pada tahun 1995, negara maju wajib mengurangi subsidi ekspor sebanyak 36% dar total nilai (budgetary) dan penurunan volume sebesar 21% dalam kurun waktu 6 tahun dan untuk negara berkembang pengurangan sebesar 24% dan 14% dalam kurun waktu 10 tahun.

Oleh sebab itu subsidi ekspor dibatasi, yaitu terkait yang terdiri dalam empat aspek untuk yang pertama, ekspor produk spesifik dikurangi sesuai dengan komitmen.aspek kedua, setiap kelebihan pengeluaran pemerintah untuk keperluan itu dibatasi sesuai yang telah disepakati.aspek ketiga, subsidi ekspor bagi negara berkembang dianggap konsisten,aspek keempat, subsidi ekspor selain dari yang masuk dalam komitmen pengeluaran namun dilaksanakan dikuar komitmen itu diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak WTO terlebih dahulu.

Pada dasaranya bukti dari penerapan ketentuan tersebut.subsidi ekspor bagi negara berkembang yang sangat minim,hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang kurang,berbeda dengan negara maju yang mamu memberikan subsidi domestiknya dalam jumlah yang tinggi. Dalam bentuk lain subsidi ekspor lebih banyak diberikan dalam bentuk-bentuk kemudahan perizinan dalam kegiatan ekspor. Sehingga tanpa adanya pengurangan subsidi ekspor didalam AOA, beberapa negara berkembnagpun sudah terpagari dengan kondisi mereka sendiri.(Windfuhr dalam Ridha Amaliyah, Jurnal Vol 2 no5 hal13-16, Dampak penetapan Agreement on Agriculture terhadap ketahann pangan Indonesia: Kasus kedelai impor, Universitas Airlangga)

1. Subsidi Domestik

Dukungan domestik adalah bentuk subsidi atau dukungan subsidi bagi petani produsen, dukungan domestik ini diusahakan secara perlahan dihilangkan, walaupun dukungan domestik tetap ada dan akan dicari yang paling kecil sekali pengaruhnya terhadap distorsi perdagngan terhadap untuk masing-masing produk pertanian. Tujuan hal ini untuk menciptakan kedisiplinan petani dan mengurangi dukungan terhadap petani.Tedapat 3 tipe dukungan domestik atau subsidi domestic yaitu yang pertama kelompok Amber box,Green Box dan Blue Box.disamping itu terdapat Aggregate Measurement Support (AMS) yang menjadi tolak ukur pembatasan dukungan domestik yang ditentukan. Berikut penjelasan ketiga tipe tersebut :

1. Amber Box

Didalam program AMS Digolongkan menjadi 3 jenis didalam pemotongan AMS, bagi begara maju pemotongan sebesar 20-36 persen selama 6 tahun.Sedangkan negera berkembang diharuskan sebesar 13 persen untuk kurun waktu 10 tahun.Sedangakan untuk negara terbelakang atau belum berkembang tidak diharuskan membuat pengurangan dalam bentuk apapun.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenjang | Rentan/milyar (Dollar AS) | Pemotongan |
| 1 | 0-12/15 | 37-60 persen |
| 2 | 12/15-25 | 60-70 persen |
| 3 | >25 | 70-83 Persen |

Tabel.2.Tingkat Pemotongan AMS ,Sumber:analis kebijakan Pertanian,volume 5 no:4,2007.

Yang dimaksud dalam tabel bahwa, pada jenjang pertama perhitungan AMS antara nol sampai kurang dari 12 atau 15 milyar(belom ditentukan tetapi berjalan sampai sekarang) ,maka pemotongan yang dikenakan sebesar 37-60 persen. Untuk jenjang kedua berlaku bagi negara yang AMSnya berada pada 12-15 bahkan sampai 25 milyar,maka pemotongan akan dikenakan sebesar 60-70 persen. Selanjutnya dalam jenjang ketiga bagi negara yang AMSnya Melebihin 25 milyar , maka tingkat pemotonganya sebesar 70-83 persen.

Hal ini, Negara Berkembang khususnya Indonesia dengan Vietnam tidak dapat memberikan dan memberlakukan Subsidi Domestik melampaui De Minimis yang telah ditentukan dengan perhitungan AMS, karena tingkat pemotongan tidak melibihi batasan lebih dari 25 persen yang kemudian diharapkan untuk menyeimbangkan pasar yang dapat terwujudnya stok penyangga pangan.

1. Blue Box

Blue box adalah dukungan yang tujuannya mengurangi distorsi,dukungan domestik yang dikategorikan kedalam amber box akan dimasukan kedalam blue box jika hal tersebut menuntut dikuranginya produksi oleh petani. Bentuk dukungan domestik ini merupakan dukungan langsung yang berhubungan dengan tanah pertanian dan ternak.

Subsidi yang pada kondisi normal ditempatkan dalam Amber Boxakan berada pada Blue Box jika subsidi yang diberikan bertujuan untuk membatasi jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani. Bentuk bantuan langsung (direct payments) seperti ini juga dapat memperoleh pengecualian dalam komitmen penurunan tarif. Kriteria bantuan langsung yang diberikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diperuntukkan bagi petani yang membatasi luas lahan dan tingkat produksi dari komoditas yang diusahakan produksi yang tetap)
2. Bantuan yang diberikan kurang lebih sebesar 85 persen dari nilai tingkat produksi yang tetap atau
3. Bantuan yang didasarkan pada jumlah kepemilikan hewan ternak pada jumlah yang terbatas.

Seperti yang telah disebutkan, bahwa bantuan langsung dalam kategori Blue box ini tidak akan diberikan kepada petani maupun peternak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produktifitasnya Blue box pada dasarnya merupakan bagian yang akan memperingan pengurangan dukungan domestik.

1. Green Box

Green box merupakan kelompok subsidi yang tidak berpengaruh atau pengaruhnya sangat kecil terhadap perdagangan.Subsidi tersebut harus dibiayai oleh dari anggaran pemerintah (tidak dengan membebani konsumen dengan harga yang lebih tinggi) dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa WTO memberikan dukungan pada beragam program pengembangan dibawah ketentukan Green Box yang dikecualikan dalam pengurangan subsidi. Yang terdapat program-program tersebut adalah jasa umum,pemangku kepentingan publik serta untuk ketahanan pangan ,bantuan dalam negeri,pembayaran untuk bencana. Aturan-aturan tersebut diklasifikasikan dalam ketentuan jasa umum.*(Hata. Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO.Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum.Refika Aditama. Bandung. 2006).*

Dari semua aturan dalam subsidi domestik merupakan sebuah terobosan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memacu pertumbuhan ekonomi.sehingga terciptanya pemerataan ekonomi disemua negara anggota WTO, dalam penelitian ini menunjukan bahwa posisi Indonesia dan Vietnam dalam jumlah pomotongan tariff yang ada dalam Aggregat Measurement Support (AMS) dalam jenjang pemotongan sebesar 37-60 persen yang dimana jumlah tak melebihi angka 15 milyar, akan tetapi dalam jenjang pertama ini masih terjadi proses yang belum menentukan hal pasti, berapa sesungguhnya pemotongaan tariff yang ditetapkan. Sehingga bagi Negara berkembang masih belum bisa diberikan pemerataan yang adil , tetapi masih mengikuti aturan WTO yang sampai sekarang ini.

Hubungan Indonesia dengan Vietnam telah lama berkerja sama pada tahun 1993 yang bergerak dibidang perdagangan,investasi,iptek,perikanan dan pertanian. Hubungan kedua negara tersebut sudah berjalan dengan baik dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memperluas kerjasamanya di bidang pertanian khususnya sektor perdagangan beras, yang meningkatnya tingkat kebutuhan beras dimasyarakat yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang meningkat , kebutuhan dalam negeri meningkat, produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sulitnya produktivitas dalam pengelolaan lahan. Serta bencana alam yang dapat menyebabkan tingkat produksi beras menurun.

Salah satu bentuk kerjasama impor pangan yang dilakukan Indonesia untuk menangani permasalahan krisis pangan yaitu, kerjasama dengan Vietnam.Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan Vietnam tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama bilateral di bawah payung *the Joint Commission Indonesia-Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation* (JCESTC). Pada petemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai impor beras, pemerintah kedua negara menuangkannya dalam *Memorandum on Rice Trade* yang disepakati pada tanggal 5 April 2007 untuk masa kerja samasampai dengan 31 Desember 2009.*MoU on Rice Trade* ini kemudiandiperpanjang pada tahun 2009 untuk jangka waktu 2010-2012.*MoU on Rice Trade* yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing pihak. Isi dari perjanjian ini berisi perjanjian yang dimana tidak tiap tahun harus impor beras dari pihak Vietnam, melainkan hanya jika Indonesia terjadi kekurangan beras atau stok persediaan beras dalam negeri tidak mencukupi maka akan berlangsung impor beras dari Vietnam sebanyak satu juta ton. Dengan langkah melakukan kerjasama dengan Vietnam guna untuk antisipasi kekurangan dan mempertahankan ketahanan pangan nasional.*(*[*http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\_detail&news\_category\_id=1&news\_*](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_)*sub%20\_category\_id=0&news\_content\_id=689&alldate=true., diakses 30 Desember2016).*

Dalam kurun waktu 8 tahun terkahir pemerintahan presiden Susilo bambang Yudhoyono. Indonesia mengalami banyak bencana alam,konflik sosial maupun konflik politik pada saat itu terjadilah kekurangan stok pangan nasional Penyebab Indonesia melakukan impor beras dengan Vietnam ada 2 faktor yang melakukan Indonesia impor beras Vietnam yaitu : Faktor Internal dan Eksternal yang dimana faktor internal meliputi terjadinya bencana alam,konflik sosial dan fluktuasi harga ,sedangkan faktor eksternal indonesia impor beras dari vietnam yaitu kondisi pertanian vietnam yang baik serta pengelolaan lahan yang baik,teknologi yang digunakan yang maju serta adanya pengembangan beras dari radiasi nuklir yang dinamakan VND memiliki kulaitas yang bagus,serta bisa panen tiga kali dalam setahun dan tahan terhadap cuaca yang sewaktu-waktu berubah.

Dengan melihat faktor eksternal atau kondisi Vietnam yang sangat maju dalam mengelola pertanianya dengan membuat tiga kebijakan yang berhasil menyejahterakan para petaninya maka Vietnam menjadi negara pengekspor beras terbesar Melihat kondisi tersebut Indonesia memilih Vietnam ekspor beras ke Indonesia guna mensuplai kebutuhan beras di dalam negeri dalam mencapai ketahanan pangan.

Joint Commission Indonesia – Vietnam on Economic,Scientific Technical Cooperation (JCESTC) Dalam Ketentuan WTO. Dalam pelaksanaannya Indonesia melakukan kerjasama dengan Vietnam untuk mengimpor beras dari Vietnam. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam merupakan bentuk kerja sama di bawah payung The Joint Commission Indonesia- Vietnam on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JCESTC), yang merupakan agenda utama rangkaian kunjungan kerja Misi Dagang ke Ho Chi Minh City, Vietnam*.*Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengeenai impor beras yang dituangkanya dalam Memorandum On Rice Trade yang desepakati pada 5 April 2007 untuk jangka waktu masa kerjasama 31 Desember 2009. MOU Rice Trade diperpanjang dalam jangka waktu sampai tahun 2012.MOU on Rice Trade yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan masing-masing pihak yang berisi jaminan suplai impor beras Vietnam sebanyak 1 juta ton per tahun apabila dibutuhkan dalam mengatasi kekuarangan pasokan beras dalam negeri. Pada tahun 2008 MOU JSTEC tidak menuntut untuk tiap tahun mengimpor beras Vietnam, ini terbukti bahwa pada tahun 2008 Indonesia tidak melakukan impor beras, karena stok beras dalam negeri sudah mencukupi.([http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-WTO.pdf/Diakses tanggal 28April 2016](http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/Full-Report-WTO.pdf/Diakses%20tanggal%2028April%202016)).

Permasalahan impor beras Indonesia Dengan Vietnam melalui Agreement Of Agriculuture (AOA) memegang peranan untuk mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan AOA dibidang pertanian khusunya beras,serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar dibidang tariff maupun non tariff, hal ini AOA dalam Kerangka WTO mengawasi praktek dagang diindonesia dengan meninjau kebijakan perdagangan negara anggotanya.

Dalam Diplomasi Ekonomi,aktor dalam pelaksanaanya bisa bilateral dan multilateral yang artinya diplomasi bisa mencakup dua negara atau lebih dari dua negara dan bekerjasama dalam suatu organisasi internasional. maka dalam penelitian ini membahas tentang Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Standarisasi World Trade Organization Studi Kasus Impor Beras Indonesia Vietnam Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan negara dengan negara (G to G), akan tetapi kedua negara merupakan anggota WTO yang mengatur tentang sistem perdagangan kedua negara tersebut. maka WTO sebagai pengawas dan pembuat aturan yang ada didalamnya yang memberikan sistem perdagangan yang adil bagi kedua negara tersebut dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh WTO. sebagai jalan dalam memaksimalkan diplomasi ekonomi. Mengenai diplomasi ekonomi terdapat tiga isu penting yaitu:

1. Hubungan antara ekonomi dan politik
2. Hubungan antara lingkungan serta tekanan domestik dan internasional
3. Hubungan antara actok negara dan non negara(actor privat atau swasta).

Ketiga isu dalam diplomasi ekonomi tersebutlah yang akhirnya akan menjadi warna dalam kegiatan diplomasi dalam dinamika hubungan internasional.uraian ketiga isu diatas menjelaskan dari isu pertama mengacu pada kondisi yang terjadi ditengah perkembangan yang semakin tinggi dari ketiga isu diatas serta isu-isu ekonomi global yang semakin rumit, hubungan ekonomi dan politik tidak bisa berjalan beriringan. Karena isu politik menjadikan hambatan hubungan diplomasi ekonomi yang dimiliki suatu negara,sebaliknya dimana hubungan ekonomi suatu negara terbentuk tanpa disibukan dengan hubungan politik yang mereka miliki.Tingkat ekonomi domestik sebagai basis instrument kebijakan luar negeri,dalam konteks ini tingkat kesiapan domestik yang rendah menjadikan pengaruh dalam peningkatan diplomasi ekonomi terhadap suatu negara, yang dimaksudkan rendahnya daya saing suatu negara dalam bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan negara lainya.

Tingkat kesiapan domestik dan daya saing sebuah negara akan menentukan pula kapasitas dan kemampuan ekonomi nasional. Sementara itu dengan kemampuan negara dan sektor sawasta dalam hubungan ekonomi atau perdagangan internasional. Semakin harmonisnya hubungan antar pemerintah (Negara) dan sektor swasta serta semakin tingginya tingkat koordinasi hubungan antara actor negara dan non negara akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi.

Peranpentingdaridiplomasi.Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah dapat memajukan diplomasi ekonomi secara bertahap guna memaksimalkan kemampuan atas pelaksanaan diplomasi ekonomi. hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mengintegrasikan kebijakan ekonomi dengan diplomasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, dan publik. Langkah ini diperuntukan demi adanya sinergi antar lembaga pemerintah serta kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta dan publik serta meningkatkan kapasitas perwakilan-perwakilan.Peningkatan kapasitas perwakilan Indonesia dapat dilakukan dengan pembentukan pusat pendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi.

PENUTUP

Peranan WTO yang sebagai Organisasi Perdagangan Dunia yang mengatur tentang persetujuan bidang pertanian dalam perjanjian Agreement Of Agriculture (AOA). Kedua negara tersebut adalah negara berkembang dan pengaturan AMS sebesar 13 dengan pengurangan berjenjang membutkitkan kedua negara anggota tersebut melaksanakan aturan apa yang diterapkan akan tetapi dengan pengaturan yang sewaktu-waktu berubah yang mengakibatkan naik turunya pengurangan pemotongan sehingga dapat dilihat bahwa tingkat pemotongan yang belum tetap serta dapat mengakibatkan resiko dalam tujuanya menjadikan perdagangan yang adil. Akan tetapi kedua negara harus melakukan apa yang diatur dalam WTO guna memaksimalkan perdagangan kedua negara.

Dengan kondisi pertanian Vietnam yang baik ,Diplomasi Ekonomi Indonesia harus memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik serta satu tujuan dari pemerintah,swasta,stakeholder, serta optimalisasi diplomasi ekonomi terhadap kapasitas dan kemampuan domestik pemerintah(pusat dan daerah) dan dapat menjadikan diplomasi ekonomi Indonesia dalam organisasi WTO yang perjanjian-perjanjian sewaktu-waktu berubah maka diplomasi ekonomi Indonesia harus dapat sepenuhnya berjalan dengan baik dalam kondisi isu-isu dalam WTO serta menjadikan diplomasi ekonomi Indonesia sebagai simbol kekuatan negara dimata internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A.M Huberman Miles,B, Miles dan,1992, *Analisis Data Kualitatif* ,UI,Press Jakarta.

Bakrie,Umar Suryadi, 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*,.Jakarta,PustakaPelajar,

Baranay,Pavol. 2009.,*Modern Economic Diplomacy.Latvia,Publications of Diplomatic Economic Club*

Hata.TH.2006.Perdagangan Internasional *Dalam Sistem GATT dan WTO.Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*..Hata.RefikaAditama. Bandung.

Tambuan,Tulus.T.H.2004 dalambukunya “*Globalisasi dan Perdagangan Internasional. Jakarta.Gahlia Indonesia.*

Rana, S. K. 2007,*“Economic Diplomacy: the Experience of Developing States*,” dalam The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations, ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. Hampshire,Ashgate Publishing,

*Sekilas WTO edisiketujuh 2013*, KementerianLuarNegeri Indonesia.

Akbar Kurnia Putra,2016 Journal.Vol 1hal 90-105. *Agreement Of Agriculture*,Universitas Jambi.

Rasyidin,Abdulah William, 2016.Skripsi *Peran WTO Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia Pada AFTA*,Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Tiara. Maharani.2014..3,januari 2014. Journal Volume 7 No, *DiplomasiEkonomi :Peran dan Fungsi dalam Ekonomi Modern. Hubungan Internasional*.Univesitas Indonesia.